

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku:

Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abdul Khakim, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Penerbit Kencana.

Ari Hernawan, 2019, *Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial*, Yogyakarta: UII Press.

Ester Lianawati, 2009, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT*, Yogyakarta: Paradigma Indonesia.

Editus Adisu dan Libertus Jehani, 2007, *Hak-Hak Pekerja Perempuan*, Jakarta: Visi Media.

Gunawi Kartasapoetra, dkk., 2008, *Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Bandung: Amrico.

Imam Soepomo, 1983, *Hukum Perburuhan Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja Cetakan Kelima*, Djambatan.

\_\_\_\_\_, 1985, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan.

\_\_\_\_\_, 2001, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.

Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa.

Majda El Muhtaj, 2009, *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002*, Jakarta.

Muchsan, 2002, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Muhammad Firdaus, dkk., 2007, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*, Jakarta: KOMNAS HAM.

M. Yamin, 1959, *Naskah Persiapan UUD NRI 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Oemar Seno Adji, 1966, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Jakarta: Simposium UI.

Paulus E. Lotulung, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Shalia Indonesia.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

S.F. Marbun, 2002, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Subekti, 1997, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni.

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Widiada Gunakarya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Yopi Gunawan dan Kristian, 2015, *Pengembangan Konsep Negara Hukum dan Hukum Pancasila*, Jakarta: Refika Aditama.

Zainal Asikin, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Zaeni Asyhadie, 2008, *Aspek – Aspek Hukum Jamninan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## **b. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75 dan Berita Negara Nomor 1959).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.224/MEN/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1989 Tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Wanita Karena Menikah, Hamil dan Melahirkan.

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 19).

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan, Pengelolaan Dan Pemberhentian Pegawai



Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 36).

**c. Jurnal/ Internet:**

Agus Riwanto & Seno Wibowo Gumbira, 2017, “*Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep Dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut UUD NRI 1945)*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 3, November, 2017.

Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati dan Absori, 2019, “*Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare state Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31 No. 2, Juni, 2019.

Fenny Natalia Koe, 2013. *Hak Pekerja yang Sudah Bekerja namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja atas Upah Ditinjau Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol.2 Nomor 1, Surabaya.

Haposan Siallagan, 2016, *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 18 No. 2, 2016.

Ngajulu Petrus, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di PT. Swara Indah Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, *JOM Fakultas Hukum*, Vol 3, No 2, 2016.

Nur Rohim Yunus, 2015, “*Aktualisasi Welfare state Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan*”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3 No. 2, Desember, 2015.

Yuli Asmara Triputra, 2017, “*Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global Ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law*, Universitas Islam Indonesia, Vol. 24., No. 2., April 2017, Yogyakarta.

Zakie Mukmin, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Perempuan Pada Malam Hari*, Jurnal Hukum, Vol 13, No 1, 2006.

Jorgen Goul Andersen, “*Welfare State and Welfare State Theory*”, Working Paper Centre for Comparative Welfare Studies, Department of Political Science, Aalborg University, di akses dari: [http://www.dps.aau.dk/digitalAssets/205/205089\\_80-2012-joergen-goul-andersen.pdf](http://www.dps.aau.dk/digitalAssets/205/205089_80-2012-joergen-goul-andersen.pdf), diakses pada 20 Agustus 2020.

Diakses dari <https://www.tribunnewswiki.com/2020/04/04/rsud-banyumas> pada tanggal 17 November 2020.

Website RSUD Banyumas, Lowongan RSUD Banyumas, diakses dari: <https://rsudbms.banyumaskab.go.id/site>, diakses pada, 9 Agustus 2020.

